

## **Kekuasaan Jokowi dalam Perspektif Michel Foucault**

**Teodorus Tio<sup>1\*</sup>**

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Widya Sasana

Email:teoaza3034@gmail.com

---

### **Abstrak**

Artikel ini menganalisis kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam konteks demokrasi Indonesia dengan menggunakan perspektif filsafat kekuasaan Michel Foucault. Foucault memahami kekuasaan sebagai sesuatu yang tersebar dalam jaringan relasi sosial dan tidak hanya beroperasi melalui institusi negara. Dalam analisis ini, kepemimpinan Jokowi dipahami sebagai produk dari dinamika kekuasaan yang melibatkan negara, masyarakat sipil, dan berbagai aktor lainnya. Dengan menggunakan kerangka kerja Foucault, artikel ini mengkaji bagaimana kekuasaan di era Jokowi mempengaruhi praktik demokrasi, terutama dalam hal pengendalian wacana, kebijakan pembangunan infrastruktur, dan hubungan antara negara dengan masyarakat. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa kekuasaan di era Jokowi terdistribusi dalam berbagai bentuk, mulai dari pengaturan wacana publik hingga regulasi dan kontrol terhadap aktor-aktor sosial, yang memperlihatkan kekuasaan dalam dimensi mikro dan makro. Artikel ini menawarkan perspektif baru dalam memahami hubungan antara kekuasaan dan demokrasi di Indonesia serta memberikan wawasan tentang kompleksitas dinamika politik di bawah pemerintahan Jokowi.

**Key Words:** *Kekuasaan, Jokowi, Michel Foucault, Politik, Sosial.*

### **Pendahuluan**

Kekuasaan dalam demokrasi selalu menjadi topik perdebatan yang menarik perhatian para filsuf dan ilmuwan politik. Sebagai sebuah konsep yang mengatur relasi antara pemerintah dan rakyat, kekuasaan tak hanya dipahami secara normatif sebagai sarana menjaga kestabilan, tetapi juga kerap ditinjau dari perspektif kritis. Salah satu filsuf kontemporer yang menaruh perhatian besar terhadap masalah kekuasaan adalah Michel Foucault.<sup>1</sup> Foucault, melalui karya-karyanya seperti *Discipline and Punish* dan *The History of Sexuality*,<sup>2</sup> mengungkapkan bahwa kekuasaan tidak hanya terpusat di tangan lembaga-lembaga besar, tetapi juga tersebar dan bekerja melalui praktik-praktik sehari-hari, bahasa, dan

---

<sup>1</sup> Arlin, Arlin, and Syamsu A. Kamaruddin. "Sosiologi Kritis Teori Sosiologi Michel Foucault." *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 6.1 (2023): 3.

<sup>2</sup> Angela King, "Prisoner of Gender: Foucault and the Discipline of the Female Body" dalam *Journal of International Women's Studies*, vol.5, no.2 (2004): 29

norma-norma sosial. Kekuasaan bukanlah sesuatu yang statis atau hanya bersifat represif, tetapi juga produktif, menciptakan individu dan masyarakat melalui mekanisme pengawasan, disiplin, dan kontrol.<sup>3</sup>

Kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan salah satu demokrasi di Indonesia yang menarik untuk dianalisis dari perspektif kekuasaan Foucaultian. Jokowi, yang dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang merakyat dan fokus pada pembangunan<sup>4</sup>, sering dipandang sebagai sosok yang dekat dengan rakyat. Namun, di balik narasi populisnya, muncul berbagai pertanyaan mengenai bagaimana kekuasaan dijalankan dan bagaimana kontrol terhadap masyarakat diorganisir dalam era pemerintahannya.

Kajian di Indonesia mengenai kekuasaan dan kepemimpinan dalam demokrasi sebagian besar berfokus pada kajian normatif yang melihat kekuasaan sebagai alat pengelolaan negara dan pengambilan keputusan politik. Penelitian-penelitian sebelumnya tentang kepemimpinan Presiden Jokowi sering menyoroti gaya kepemimpinannya yang populis, kemampuannya membangun narasi kedekatan dengan rakyat, serta fokus pada pembangunan. Misalnya, studi dari Marcus Mietzner (2015) menggambarkan Jokowi sebagai tokoh yang membawa pendekatan baru dalam politik Indonesia, dengan memfokuskan pada reformasi birokrasi dan penguatan otonomi daerah.

Kajian ini berfokus pada analisis kepemimpinan Jokowi dari perspektif Michel Foucault, dengan tujuan mengungkapkan dinamika kekuasaan yang mungkin tersembunyi di balik gaya kepemimpinan populis yang diusungnya. Analisis ini menjadi penting karena menawarkan perspektif baru yang berbeda dari pendekatan-pendekatan tradisional dalam memahami kepemimpinan politik, yang sering kali hanya melihat kekuasaan sebagai alat yang digunakan oleh pemimpin untuk mengendalikan negara. Dengan menggunakan teori Foucault tentang kekuasaan, penelitian ini akan menggali bagaimana kekuasaan dalam pemerintahan Jokowi tidak hanya dijalankan secara *top-down*, tetapi juga melalui mekanisme yang lebih kompleks dan tersebar dalam berbagai dimensi kehidupan sosial dan politik.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada kebutuhannya untuk mengeksplorasi keunikan kepemimpinan Jokowi yang sering kali diklaim sebagai "baru" dan "progresif" dalam lanskap politik Indonesia. Selain itu, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendasar terkait bagaimana kekuasaan bekerja dalam konteks demokrasi modern, yang sering kali ditandai dengan perpaduan antara kontrol negara yang semakin canggih dan kebebasan individu yang diklaim terus diperluas. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang unik dalam literatur tentang demokrasi, kekuasaan, dan kepemimpinan, khususnya di Indonesia, serta memperkaya kajian-kajian yang telah ada mengenai hubungan antara kekuasaan dan kepemimpinan politik di era kontemporer.

## Kekuasaan sebagai Jaringan Relasi

---

<sup>3</sup> Hidayah, N., Nuro, P., Safia, A., Syahira, N., & Hamdani, I. Filsafat Ilmu: Epistemologi Post-strukturalisme Dalam Menjelajahi Kekuasaan, Pengetahuan Dan Kebenaran. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2.6 (2023), 429.

<sup>4</sup> Safira, S., & Yulyana, E. Perbandingan Political Branding Joko Widodo Dengan Ma'ruf Amin Pada Pemilu 2019. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 10. 2 (2024): 311.

Pandangan Michel Foucault tentang kekuasaan menekankan bahwa kekuasaan tidak beroperasi secara terpusat atau hanya dimiliki oleh individu atau lembaga tertentu. Sebaliknya, kekuasaan tersebar dan berfungsi melalui jaringan relasi sosial yang kompleks di seluruh aspek kehidupan masyarakat<sup>5</sup>. Menurut Foucault, kekuasaan hadir di mana-mana, dalam interaksi sehari-hari, dan tidak hanya dimiliki oleh negara atau institusi, tetapi oleh setiap individu yang terlibat dalam hubungan sosial. Kekuasaan ini tidak selalu hadir dalam bentuk yang represif, melainkan sering kali bekerja melalui mekanisme yang halus dan tersembunyi, seperti norma-norma sosial, aturan tak tertulis, dan kebijakan yang mengatur cara kita berpikir dan berperilaku.<sup>6</sup>

Salah satu ciri utama dari konsep kekuasaan Foucault adalah bahwa kekuasaan bukan hanya tentang kontrol langsung. Negara atau pemimpin politik mungkin memiliki peran penting, tetapi mereka bukan satu-satunya agen yang menjalankan kekuasaan. Norma-norma sosial, seperti apa yang dianggap sebagai perilaku yang tepat atau salah, adalah contoh bagaimana kekuasaan beroperasi tanpa pemaksaan langsung. Misalnya, cara masyarakat memahami gender atau kelas sosial menciptakan aturan tak terlihat yang mengarahkan perilaku individu dan kelompok. Individu sering kali patuh terhadap aturan ini tanpa disadari karena mereka telah menginternalisasi norma-norma tersebut.

Dalam pandangan ini, kebijakan pemerintah atau regulasi sosial juga merupakan bentuk kekuasaan yang beroperasi dengan cara yang lebih halus. Kebijakan publik, seperti sistem pendidikan atau kebijakan kesehatan, adalah alat untuk mengatur kehidupan masyarakat. Namun, regulasi ini tidak selalu dipaksakan secara langsung melalui hukuman, tetapi berfungsi untuk membentuk perilaku secara tidak langsung. Pendidikan, misalnya, tidak hanya mengajarkan keterampilan, tetapi juga membentuk individu menjadi warga negara yang patuh terhadap norma-norma sosial dan nilai-nilai tertentu. Kebijakan kesehatan yang mendorong gaya hidup sehat mungkin tampak netral, tetapi sebenarnya merupakan alat kekuasaan yang membentuk perilaku individu.<sup>7</sup>

Kekuasaan, menurut Foucault, tidak pernah statis; ia selalu berubah dan bergerak melalui interaksi sosial. Kepemimpinan politik dalam kerangka ini tidak bisa dipahami hanya sebagai hubungan *top-down* antara pemimpin dan rakyat. Sebaliknya, kekuasaan didistribusikan di berbagai lapisan masyarakat melalui jaringan interaksi sosial yang rumit. Setiap individu dalam masyarakat memainkan peran dalam menjalankan kekuasaan, baik secara sadar maupun tidak sadar, melalui bagaimana mereka mematuhi norma-norma dan aturan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kekuasaan beroperasi secara desentralisasi, tersebar melalui tindakan sehari-hari, bukan hanya melalui instruksi dari otoritas yang lebih tinggi.

Pendekatan Foucault terhadap kekuasaan mengajak kita untuk melihatnya sebagai sesuatu yang bekerja di tingkat mikro, melalui praktik sosial sehari-hari, dan tidak hanya di tingkat makro, seperti lembaga politik. Kekuasaan hadir dalam cara kita berbicara, berpikir, dan bertindak dalam interaksi sosial kita. Pandangan ini membuka pemahaman baru tentang bagaimana kekuasaan tidak selalu datang dari atas

---

<sup>5</sup> M. J. Latif, & Warsito, L. C. Kritik Ulama terhadap LGBT dalam Konten Youtube Ragil Mahardika: Analisis Teori Kekuasaan Michel Foucault. *Journal of Ushuluddin and Islamic Thought*, 1.2 (2023): 267.

<sup>6</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Post-Modern* (Bantul: Kreasi Wacana, 2016), 650.

<sup>7</sup> Manghiut Siregar, "Kritik terhadap Teori Kekuasaan-Pengetahuan Foucault", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 1, no. 1 (2021), 3.

ke bawah, tetapi juga bagaimana ia dibentuk, direspon, dan disebarikan melalui hubungan-hubungan sosial yang dinamis di masyarakat.

Dalam konteks kepemimpinan Presiden Joko Widodo, distribusi kekuasaan dalam jaringan relasi ini terlihat dalam berbagai kebijakannya, terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Jokowi, sejak awal pemerintahannya, telah menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama, baik dalam bentuk pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, maupun sistem transportasi publik. Namun, pembangunan infrastruktur ini bukan hanya sekadar kebijakan pembangunan fisik, melainkan juga merupakan cara negara untuk menata dan mengatur ruang kehidupan sosial.<sup>8</sup> Dengan membangun dan memperbaiki infrastruktur, negara mengatur alur pergerakan manusia, barang, dan jasa, yang pada akhirnya berkontribusi pada kontrol yang lebih luas terhadap ruang publik dan aktivitas masyarakat di dalamnya.

Pembangunan infrastruktur juga bisa dilihat sebagai bentuk kekuasaan yang bekerja melalui pengaturan ruang. Dengan menciptakan infrastruktur baru, negara tidak hanya membangun jalan atau jembatan, tetapi juga mengubah cara masyarakat bergerak, berinteraksi, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Jalan tol, misalnya, menghubungkan daerah-daerah yang sebelumnya terisolasi dan menciptakan akses baru untuk mobilitas ekonomi dan sosial. Namun, di balik manfaat ekonomi dan sosial ini, terdapat elemen kekuasaan yang bekerja dalam mengatur pergerakan dan distribusi penduduk. Negara, melalui kebijakan infrastrukturnya, pada dasarnya mengontrol bagaimana ruang digunakan<sup>9</sup> dan bagaimana masyarakat mengakses ruang tersebut, baik dalam konteks pergerakan fisik maupun sosial.

Proyek infrastruktur yang diinisiasi oleh Jokowi juga dapat dilihat sebagai cara negara untuk memperkuat legitimasi kekuasaan. Pembangunan fisik yang terlihat dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat, seperti jembatan yang megah atau jalan tol yang mempercepat perjalanan, memberikan simbol keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan janji-janji kampanyenya. Pencapaian-pencapaian konkret ini menjadi alat bagi negara untuk menunjukkan kekuatan dan keberhasilannya, yang pada akhirnya memperkuat legitimasi politik Jokowi di mata rakyat. Dalam hal ini, pembangunan infrastruktur bukan hanya soal teknis atau ekonomi, tetapi juga soal kekuasaan, karena melalui pencapaian-pencapaian ini, pemerintah membangun narasi tentang keberhasilannya dalam memimpin dan mengontrol negara.

## Pengendalian Wacana Publik

Salah satu dimensi kekuasaan yang dikembangkan oleh Michel Foucault adalah kontrol atas wacana (*discourse*), yang ia pandang sebagai alat penting dalam membentuk realitas sosial dan mengarahkan cara orang untuk berpikir kritis terhadap suatu peristiwa yang terjadi<sup>10</sup>. Wacana, menurut Foucault, bukan hanya sekumpulan kata atau kalimat, tetapi struktur yang lebih luas yang menentukan apa yang dapat dikatakan, siapa yang dapat berbicara, dan bagaimana suatu topik dipahami dalam

---

<sup>8</sup> Imas Sholihah. "Kebijakan hukum pembangunan kawasan perbatasan melalui infrastruktur berbasis teknologi." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5.3 (2016): 319.

<sup>9</sup> Hutomo, B. W., Widodo, P., Saragih, H. J. R., & Suwarno, P. Kontribusi Indonesia Dalam Isu Kawasan Indo-Pasifik Melalui Kebijakan Global Maritime Fulcrum. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7.1 (2023), 149.

<sup>10</sup> Michel Foucault. *The Order of Thing, Archeology of Human Sastra dan Kekuasaan / 151 Sciences. (ter. Priambodo & Pradana Boy)*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 10.

masyarakat. Melalui kontrol atas wacana, kekuasaan dapat mengatur pengetahuan, membentuk norma sosial, dan membatasi cara orang berbicara tentang realitas mereka sendiri. Kekuasaan tidak selalu tampak sebagai dominasi langsung, melainkan dapat beroperasi melalui kontrol terhadap apa yang dianggap sah untuk dibicarakan dan dipahami.

Foucault berargumen bahwa wacana merupakan medan pertempuran kekuasaan, di mana berbagai institusi, termasuk negara, agama, dan sains, berlomba untuk menentukan apa yang dianggap sebagai "kebenaran." Wacana bukanlah refleksi pasif dari realitas, melainkan cara untuk menciptakan dan mengendalikan realitas. Misalnya, dalam bidang kesehatan, bagaimana penyakit tertentu dibicarakan—seperti HIV/AIDS di masa awal epidemi—dapat menentukan cara pandang masyarakat terhadap penderita, dan pada akhirnya, bagaimana mereka diperlakukan. Negara dan institusi kesehatan dapat mengontrol narasi tersebut untuk mempertahankan tatanan sosial tertentu, seperti mengisolasi kelompok marginal, yang menunjukkan bagaimana kekuasaan bekerja melalui kontrol wacana.<sup>11</sup>

Kontrol wacana juga berkaitan erat dengan pengetahuan. Bagi Foucault, pengetahuan dan kekuasaan selalu saling terkait; siapa pun yang mengendalikan pengetahuan, maka dapat mengendalikan cara pandang masyarakat. Foucault menyebut ini sebagai *power/knowledge*, di mana pengetahuan tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan yang menghasilkan dan menyebarkannya. Dalam bidang pendidikan, misalnya kurikulum tidak hanya berisi fakta, tetapi juga nilai-nilai dan ideologi yang dikelola oleh negara atau kelompok dominan untuk membentuk generasi yang sesuai dengan kepentingan mereka. Melalui kontrol atas wacana pendidikan, negara dapat mengatur cara individu memahami dunia, membentuk sikap sosial, dan mengarahkan perilaku mereka.

Lebih jauh lagi, Foucault menunjukkan bagaimana kontrol atas wacana membentuk identitas dan subjektivitas individu.<sup>12</sup> Dalam wacana tentang gender, misalnya, masyarakat menciptakan norma-norma tentang apa yang dianggap sebagai perilaku "maskulin" atau "feminin." Orang kemudian menginternalisasi norma ini dan membentuk identitas mereka berdasarkan wacana yang dominan. Dalam konteks ini, kekuasaan tidak hanya membatasi pilihan individu, tetapi juga membentuk cara mereka memahami diri sendiri dan orang lain. Dengan kata lain, kekuasaan melalui wacana tidak bersifat langsung dan memaksa, melainkan bekerja secara subtil dengan membentuk batas-batas pengetahuan dan pemahaman.

Pada akhirnya, Foucault mengajak kita untuk memahami bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja melalui tindakan represif atau kekerasan fisik, tetapi juga melalui kontrol atas wacana. Kekuasaan mengatur apa yang dianggap sebagai pengetahuan, kebenaran, dan realitas, yang pada gilirannya mempengaruhi bagaimana individu berpikir, bertindak, dan memahami dunia. Melalui analisisnya, Foucault mengungkapkan bahwa setiap masyarakat memiliki rejim kebenaran yang menentukan wacana mana yang dianggap sah dan mana yang tidak. Kekuasaan melalui wacana ini menjadi alat yang efektif

---

<sup>11</sup> Puteri Halimatussadiyah, Hardiyati Hardiyati, and Kusumaningdyah Nurul Handayani. "Pusat Pelayanan Dan Hunian Anak Dengan Hiv Aids Dengan Pendekatan Teori Perilaku." *Senthong* 6.1 (2023):36.

<sup>12</sup> Siswadi, G. A. Relasi Kuasa Terhadap Konstruksi Pengetahuan Di Sekolah Perspektif Michel Foucault Dan Refleksi Atas Sistem Pendidikan Di Indonesia. *Sang Acharya: Jurnal Profesi Guru*, 5.1 (2024): 1.

dalam mengontrol dan membentuk realitas sosial secara mendalam.<sup>13</sup> Dalam konteks pemerintahan Presiden Joko Widodo, pengendalian wacana menjadi sangat relevan, terutama di era digital di mana arus informasi bergerak sangat cepat dan tak terbatas. Pemerintahan Jokowi telah menggunakan strategi komunikasi yang terencana untuk membangun narasi positif tentang kebijakan pemerintah, termasuk dalam hal pembangunan infrastruktur, pencapaian ekonomi, dan stabilitas politik. Media resmi, baik cetak maupun digital, berfungsi sebagai saluran utama untuk menyebarkan narasi ini, sementara para pejabat negara dan juru bicara pemerintah memainkan peran penting dalam mengoordinasikan pesan yang disampaikan kepada publik.

Media sosial dengan pengaruhnya yang sangat besar di kalangan masyarakat, juga menjadi medan utama dalam pengendalian wacana publik oleh pemerintah. Melalui platform-platform seperti Twitter, Facebook, dan Instagram, pemerintahan Jokowi aktif membangun citra sebagai pemerintahan yang pro-rakyat dan progresif. Penggunaan tokoh publik untuk mendukung kebijakan pemerintah juga menjadi salah satu strategi dalam memperkuat narasi tersebut. Dengan pengelolaan yang cermat, media sosial menjadi alat penting bagi pemerintah untuk mengontrol arus informasi dan membingkai bagaimana kebijakan-kebijakan dilihat oleh masyarakat. Narasi pembangunan yang disebarluaskan melalui berbagai media ini, selain memperkuat citra Jokowi sebagai pemimpin yang sukses, juga membantu menciptakan persepsi stabilitas dan keberhasilan pemerintah di mata masyarakat.

Upaya di balik penciptaan narasi yang mendukung, terdapat dimensi lain dari pengendalian wacana yang lebih represif. Seiring dengan penyebaran narasi resmi pemerintah, terjadi pula pembungkaman terhadap suara-suara oposisi atau kritik yang dianggap mengganggu citra atau kebijakan pemerintah. Penangkapan aktivis, pemblokiran akun media sosial yang dianggap menyebarkan ujaran kebencian, dan pembubaran aksi protes adalah contoh bagaimana kekuasaan bekerja melalui kontrol atas ruang publik. Pemerintah menggunakan berbagai instrumen hukum dan kebijakan untuk membatasi kebebasan berpendapat, terutama di ruang digital. Hal ini menunjukkan bagaimana kekuasaan beroperasi bukan hanya melalui tindakan fisik seperti penangkapan, tetapi juga melalui pengawasan dan regulasi terhadap informasi dan opini publik.<sup>14</sup>

Dengan demikian, pengendalian wacana di bawah pemerintahan Jokowi memperlihatkan dualitas kekuasaan yang Foucault bicarakan: kekuasaan yang produktif dan represif. Di satu sisi, pemerintah secara produktif membentuk narasi positif tentang kebijakan-kebijakannya untuk memenangkan hati publik dan memperkuat legitimasi politik. Di sisi lain, ketika kritik muncul dari pihak oposisi atau masyarakat sipil, kekuasaan yang lebih represif terlihat dalam upaya membungkam, membatasi, dan mengontrol ruang publik. Ini mencerminkan bagaimana kekuasaan tidak hanya bekerja melalui struktur formal negara, tetapi juga melalui pengendalian wacana dan cara masyarakat memahami serta merespons kebijakan pemerintah.

## Regulasi Sosial dan Biopolitik

---

<sup>13</sup> Michel Foucault. *The Order of Thing, Archeology of Human Sastra dan Kekuasaan / 151 Sciences*. (ter. Priambodo & Pradana Boy). (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 11.

Michel Foucault memperkenalkan konsep biopolitik sebagai bagian dari analisisnya terhadap kekuasaan modern yang berkembang di abad ke-18 dan ke-19. Berbeda dengan kekuasaan klasik yang bersifat represif, biopolitik menekankan pada cara negara modern mengatur populasi melalui pengendalian aspek-aspek kehidupan individu. Foucault menunjukkan bahwa kekuasaan modern tidak lagi hanya berfokus pada penghukuman atau tindakan yang terlihat keras, tetapi lebih pada regulasi halus terhadap kehidupan sehari-hari, seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Biopolitik, menurut Foucault adalah cara di mana negara dan institusi menggunakan kebijakan untuk menjaga dan mengelola populasi demi kepentingan suatu negara<sup>15</sup>.

Salah satu aspek utama dari biopolitik adalah bagaimana negara mengatur kesehatan masyarakat. Negara modern menciptakan sistem kesehatan untuk memastikan bahwa populasi tetap produktif dan sehat. Misalnya, vaksinasi, sanitasi, dan pengelolaan penyakit menular menjadi alat biopolitik untuk menjaga kontrol atas kehidupan biologis warganya. Dengan menjaga kesehatan tubuh kolektif, negara dapat mempertahankan kekuatan ekonomi dan militernya. Namun, Foucault melihat ini sebagai bentuk kekuasaan yang terselubung: melalui regulasi kesehatan, negara sebenarnya mengontrol kehidupan individu dalam bentuk yang sangat terstruktur tetapi tidak terlihat represif.

Dalam pendidikan, biopolitik bekerja melalui sistem pengajaran yang mengatur dan membentuk individu sejak usia dini. Negara modern membangun sistem pendidikan publik yang tidak hanya mentransmisikan pengetahuan, tetapi juga membentuk perilaku, norma sosial, dan kepatuhan terhadap otoritas. Foucault berargumen bahwa pendidikan adalah instrumen biopolitik yang penting, karena melalui sekolah-sekolah, negara mengatur cara individu berpikir dan bertindak di dalam masyarakat. Ini adalah bentuk kontrol yang halus tetapi sangat efektif karena individu diatur melalui struktur institusional yang terlihat netral, seperti sekolah, tetapi sebenarnya mengarahkan mereka untuk mengikuti standar sosial dan ekonomi negara.

Biopolitik juga berperan dalam pengelolaan kesejahteraan dan ekonomi. Negara mengatur sistem jaminan sosial, pengangguran, dan kebijakan ekonomi lainnya untuk memastikan stabilitas populasi. Sistem ini tampak melindungi kesejahteraan individu, namun Foucault melihatnya sebagai strategi untuk menjaga populasi tetap produktif dan sesuai dengan kebutuhan negara. Dengan mengendalikan akses individu terhadap sumber daya ekonomi, negara juga secara tidak langsung mengatur perilaku sosial dan mobilitas ekonomi warganya. Kontrol ini tidak langsung bersifat represif, tetapi tetap mempengaruhi kehidupan individu secara mendalam.

Akhirnya, konsep biopolitik menunjukkan bahwa kekuasaan modern bekerja tidak hanya melalui dominasi fisik atau paksaan, tetapi juga melalui regulasi yang tampak normal dan bermanfaat. Foucault mengungkapkan bahwa negara modern menggunakan kekuasaan dalam bentuk yang lebih halus namun tetap efektif, seperti kebijakan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan, untuk mengatur dan mengontrol populasi. Biopolitik memperlihatkan bagaimana kekuasaan bisa menyentuh setiap aspek kehidupan individu, dari tubuh biologis hingga perilaku sosial, dengan tujuan akhir menjaga stabilitas dan produktivitas negara. Dalam konteks pemerintahan Joko Widodo, penerapan konsep biopolitik ini sangat

---

<sup>15</sup> T. Purwanti, *Kuasa Tubuh Dan Perlawanan: Anti Politisasi Dan Komodifikasi Tubuh Perempuan Dalam Ruang Virtual*. *Umbara*, 5.2 (2020), 141.

jelas terlihat, terutama dalam berbagai kebijakan sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup rakyat, namun di sisi lain juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengontrol populasi.

Salah satu contoh nyata dari biopolitik di era Jokowi adalah program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Prakerja.<sup>16</sup> Program-program ini dirancang untuk memberikan dukungan finansial kepada masyarakat yang kurang mampu, membantu mereka agar lebih mandiri secara ekonomi. Meskipun di permukaan program ini tampak seperti upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dari perspektif biopolitik, kebijakan ini juga menjadi alat kontrol yang halus. Dengan memberikan bantuan, negara menciptakan ketergantungan pada sistem negara dan mengatur perilaku masyarakat yang menerimanya. Kebijakan semacam ini memposisikan negara sebagai penyedia utama sumber daya bagi warga negara, sekaligus sebagai pengatur kehidupan sosial dan ekonomi mereka.

Dalam bidang kesehatan, pemerintah Jokowi juga menerapkan kebijakan biopolitik melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.<sup>17</sup> Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan akses layanan kesehatan yang lebih merata kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama bagi mereka yang berada di lapisan ekonomi bawah. Namun, di balik tujuan mulia ini, terdapat dimensi biopolitik di mana negara mengontrol kesehatan populasi secara menyeluruh, mulai dari data kesehatan individu hingga regulasi terhadap institusi kesehatan. Negara, dengan kebijakan semacam ini, tidak hanya menjaga kesehatan masyarakat, tetapi juga memperkuat kekuasaan dengan menciptakan mekanisme kontrol yang lebih subtil terhadap tubuh warga negara.

Bidang pendidikan terkait dengan pemerintahan Jokowi mendorong kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan dan akses yang lebih luas, seperti melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kebijakan ini dirancang untuk memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak Indonesia agar dapat mengakses pendidikan formal. Namun, seperti yang diungkapkan oleh Foucault, pengaturan dalam pendidikan ini juga merupakan bentuk kekuasaan yang lebih luas. Negara, melalui sistem pendidikan, menanamkan nilai-nilai tertentu, menciptakan tenaga kerja yang terlatih, dan menormalkan standar perilaku serta pengetahuan yang sesuai dengan kepentingan negara. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfungsi untuk memberdayakan masyarakat, tetapi juga menjadi alat negara untuk membentuk individu sesuai dengan kebutuhan sosial dan ekonomi nasional.<sup>18</sup>

Semua kebijakan-kebijakan sosial yang diusung oleh pemerintah Jokowi menunjukkan bagaimana kekuasaan bekerja melalui biopolitik, di mana kehidupan sehari-hari masyarakat diatur dan dikendalikan secara halus oleh negara. Negara tidak lagi hanya berperan sebagai entitas yang menegakkan hukum dan keamanan, tetapi juga sebagai pengatur utama dalam kehidupan individu, dari kesejahteraan ekonomi, kesehatan, hingga pendidikan. Di satu sisi, kebijakan-kebijakan ini meningkatkan kualitas hidup

---

<sup>16</sup> Solikin M. Juhro, and Masagus H. Ridwan. "Beberapa Perspektif Pembangunan Ekonomi Inklusif di Era New Normal." (2021): 33.

<sup>17</sup> Mohamad Dziqie Aulia Al Farauqi, and Dzulrifani Dzulrifani. "Aspek Biopolitik Kebijakan Indonesia Dalam Menangani Pandemi Covid-19." *Jurnal Polinter: Kajian Politik dan Hubungan Internasional* 9.1 (2023):56

<sup>18</sup> L.L. Harahap, Fransiska, S., & Lestari, D. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pendidikan Berbasis Masjid (Studi Kasus Masjid Nurul Huda Desa Simpang Mandepo). *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Ilmu Pendidikan*, 1.3 (2022): 121.

masyarakat; namun, di sisi lain, mereka juga memperkuat ketergantungan masyarakat pada negara dan memperluas kontrol sosial.

### **Disiplin dan Kontrol Sosial**

Konsep *disciplinary power* yang diperkenalkan oleh Michel Foucault mengungkapkan bagaimana kekuasaan bekerja melalui mekanisme disiplin yang halus tetapi efektif dalam mengatur perilaku individu<sup>19</sup>. Foucault berpendapat bahwa kekuasaan tidak selalu berwujud dalam bentuk hukuman fisik atau paksaan langsung, melainkan melalui cara-cara yang lebih tersembunyi, seperti pengawasan, aturan, dan standar yang diinternalisasi oleh individu. Dalam konteks kepemimpinan Presiden Joko Widodo, kekuasaan disiplin ini terlihat dalam berbagai kebijakan pemerintah yang bertujuan mengontrol perilaku masyarakat, terutama melalui birokrasi dan regulasi.<sup>20</sup>

Salah satu contoh mekanisme disiplin ini adalah pengaturan penggunaan media sosial di Indonesia. Sejak awal pemerintahannya, Jokowi dan timnya secara aktif mengatur penggunaan media sosial, terutama dalam hal penyebaran informasi dan opini publik.<sup>21</sup> Peraturan yang lebih ketat tentang ujaran kebencian, penyebaran berita palsu, dan konten yang dianggap subversif menunjukkan bagaimana negara berusaha mengontrol wacana publik dan perilaku online masyarakat. Meskipun regulasi ini sering diklaim sebagai upaya untuk menjaga ketertiban dan mencegah penyebaran informasi yang merugikan, di sisi lain, kebijakan ini juga berfungsi sebagai alat kontrol yang lebih dalam terhadap kebebasan berekspresi. Pemerintah, melalui pengawasan terhadap aktivitas digital, menciptakan iklim di mana masyarakat merasa diawasi dan harus menyesuaikan diri dengan norma-norma yang ditetapkan oleh negara.

Disiplin juga dijalankan melalui penegakan hukum yang semakin intensif terhadap pelanggaran-pelanggaran sosial dan politik. Di bawah pemerintahan Jokowi, penegakan hukum terhadap tindakan-tindakan yang dianggap melanggar kepentingan negara atau merusak stabilitas nasional semakin diperketat. Aktivis politik, tokoh masyarakat yang kritis, hingga kelompok-kelompok oposisi sering kali menjadi target penindakan hukum, yang menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya berfungsi sebagai pengatur perilaku masyarakat, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga dominasi politik. Mekanisme ini tidak hanya bekerja melalui aparat penegak hukum, tetapi juga melalui berbagai institusi sosial seperti sekolah, tempat kerja, dan komunitas, yang secara bersamaan memperkuat nilai-nilai kedisiplinan yang diinginkan oleh negara.

Selain itu, pengawasan terhadap kelompok-kelompok yang dianggap subversif atau membahayakan kepentingan pemerintah semakin diperketat. Dalam beberapa kasus, kelompok-kelompok yang menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah atau yang memperjuangkan ideologi alternatif sering kali mendapatkan perhatian khusus dari aparat negara. Pengawasan ini menunjukkan bagaimana negara melalui berbagai instrumen kekuasaannya, berupaya mengontrol dan mendisiplinkan perilaku

---

<sup>19</sup> D. Harnadi, Menakar potensi sosiologi hukum sebagai pendekatan perdamaian: Pembacaan dari perspektif strukturasi giddens. *Legal Studies Journal*, 1.1 (2021): 78.

<sup>20</sup> H.S. Ningrum, F. X., & Rudiana, M. Tubuh dalam Karya “Merentang Kinestetika Tubuh”. *Jurnal Seni Nasional Cikini*, 8.2 (2022): 94.

<sup>21</sup> M. Yusuf Samad, and Diah Ayu Permatasari. "Diplomasi Digital Menteri Luar Negeri RI pada Konferensi Tingkat Tinggi Group-20 tahun 2021." *Intermestic: Journal of International Studies* 7.2 (2023): 724.

politik masyarakat pada tingkat mikro. Negara bertindak sebagai pengawas yang terus-menerus, menciptakan rasa ketakutan akan sanksi bagi mereka yang berani melanggar aturan atau menentang kekuasaan yang ada.

Dengan demikian, di bawah kepemimpinan Jokowi, mekanisme disiplin menjadi alat penting dalam menjalankan kekuasaan. Pengawasan dan kontrol sosial yang diterapkan melalui regulasi ketat, penegakan hukum, dan pengawasan terhadap kelompok-kelompok kritis mencerminkan bagaimana kekuasaan dijalankan tidak hanya melalui tindakan fisik, tetapi juga melalui pengaturan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang dijelaskan oleh Foucault, kekuasaan disiplin ini bekerja secara efektif karena ia menciptakan individu yang patuh dan disiplin, yang secara sukarela menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh negara tanpa perlu adanya paksaan langsung.

## Penutup

Melalui perspektif filsafat kekuasaan Michel Foucault, kepemimpinan Jokowi dapat dipahami sebagai manifestasi dari kekuasaan yang tersebar dalam berbagai jaringan relasi sosial. Kekuasaan tidak hanya dipraktikkan secara *top-down* melalui institusi negara, tetapi juga bekerja melalui pengaturan ruang publik, pengendalian wacana, regulasi sosial, dan mekanisme disiplin. Di satu sisi, pemerintahan Jokowi berhasil memperkuat legitimasi melalui pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi di sisi lain, kekuasaan yang terdistribusi juga menimbulkan kritik terkait pembatasan kebebasan sipil dan pengendalian sosial.

## Daftar Rujukan

- Al Farauqi, Mohamad Dziqie Aulia, and Dzulrifani Dzulrifani. "Aspek Biopolitik Kebijakan Indonesia Dalam Menangani Pandemi Covid-19." *Jurnal Polinter: Kajian Politik dan Hubungan Internasional* 9.1 (2023): 55-71.
- Arlin, Arlin, and Syamsu A. Kamaruddin. "Sosiologi Kritis Teori Sosiologi Michel Foucault." *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 6.1 (2023): 1-8.
- Foucault, Michel. *The Order of Thing, Archeology of Human Sastra dan Kekuasaan / 151 Sciences*. (ter. Priambodo & Pradana Boy). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2007.
- Harahap, L. I., Fransiska, S., & Lestari, D. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pendidikan Berbasis Masjid (Studi Kasus Masjid Nurul Huda Desa Simpang Mandepo). *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Ilmu Pendidikan*, 1.3 (2022).
- Harnadi, D. Menakar potensi sosiologi hukum sebagai pendekatan perdamaian: Pembacaan dari perspektif strukturasi giddens. *Legal Studies Journal*, 1.1 (2021).
- Hidayah, N., Nuro, P., Safia, A., Syahira, N., & Hamdani, I. Filsafat Ilmu: Epistemologi Post-strukturalisme Dalam Menjelajahi Kekuasaan, Pengetahuan Dan Kebenaran. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2.6 (2023).
- Hutomo, B. W., Widodo, P., Saragih, H. J. R., & Suwarno, P. Kontribusi Indonesia Dalam Isu Kawasan Indo-Pasifik Melalui Kebijakan Global Maritime Fulcrum. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7.1 (2023)

- King, Anggela, "Prisoner of Gender: Foucault and the Discipline of the Female Body" dalam *Journal of International Women's Studies*, vol.5, no.2 (2004).
- Juhro, Solikin M., and Masagus H. Ridwan. "Beberapa Perspektif Pembangunan Ekonomi Inklusif di Era New Normal." (2021).
- Latif, M. J., & Warsito, L. C. Kritik Ulama terhadap LGBT dalam Konten Youtube Ragil Mahardika: Analisis Teori Kekuasaan Michel Foucault. *Journal of Ushuluddin and Islamic Thought*, 1.2 (2023).
- Manghiut Siregar, "Kritik terhadap Teori Kekuasaan-Pengetahuan Foucault", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 1, no. 1 (2021).
- Ningrum, H. S., Widaryanto, F. X., & Rudiana, M. Tubuh dalam Karya "Merentang Kinestetika Tubuh". *Jurnal Seni Nasional Cikini*, 8.2 (2022).
- Purwanti, T. Kuasa Tubuh Dan Perlawanan: Anti Politisasi Dan Komodifikasi Tubuh Perempuan Dalam Ruang Virtual. *Umbara*, 5.2 (2020).
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Post-Modern*. Bantul: Kreasi Wacana. 2016.
- Safira, S., & Yulyana, E. Perbandingan Political Branding Joko Widodo Dengan Ma'ruf Amin Pada Pemilu 2019. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 10.2 (2024).
- Samad, M. Yusuf, and Diah Ayu Permatasari. "Diplomasi Digital Menteri Luar Negeri RI pada Konferensi Tingkat Tinggi Group-20 tahun 2021." *Intermestic: Journal of International Studies* 7.2 (2023).
- Sholihah, Imas. "Kebijakan hukum pembangunan kawasan perbatasan melalui infrastruktur berbasis teknologi." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5.3 (2016): 305-321.
- Siswadi, G. A. Relasi Kuasa Terhadap Konstruksi Pengetahuan Di Sekolah Perspektif Michel Foucault Dan Refleksi Atas Sistem Pendidikan Di Indonesia. *Sang Acharya: Jurnal Profesi Guru*, 5.1 (2024).